



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan media massa sebagai sarana untuk penyampaian pesan bisa dikatakan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Pada dasarnya media massa bisa dibagi menjadi dua kategori, yakni media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak yang dapat memenuhi kriteria tersebut adalah surat kabar dan majalah sedangkan media elektronik yang memenuhi kriteria media massa adalah radio, televisi, film, dan media *online* (internet) (Ardianto, Komala & Kalina, 2014, h. 103).

Menurut Burhan Bungin (2006, h. 76), media massa adalah media informasi dan komunikasi yang menyebarkan informasi secara massal dan dapat dilihat oleh masyarakat secara massal juga.

Bernard C. Cohen (2011, h. 18-19) dalam Ishwara mengatakan bahwa pers mempunyai beberapa peran umum dalam masyarakat, seperti:

- *informer*, pers bertindak sebagai mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa-peristiwa di luar pengetahuan masyarakat tanpa prasangka.
- *interpreter*, pers memberikan penafsiran atau arti pada suatu peristiwa. Selain melaporkan peristiwa, pers juga menambah bahan

dalam usaha menjelaskan artinya, misalnya analisis berita atau komentar berita.

- *watchdog*, pers menyuarakan pandangan atau tanggapan public terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu pers berperan sebagai aktif sebagai pengkritik terhadap pemerintah.

Individu mengetahui suatu peristiwa sosial dari pemberitaan yang ada di media. Oleh karena itu konstruksi realitas yang dibangun oleh seseorang dalam pikirannya, sebagian besar terbentuk karena melihat berita di media. Khalayak mendapat informasi mengenai realitas politik dan sosial yang terjadi di sekitar mereka melalui media. Karena itu, bagaimana media melakukan pembingkai pada realita tertentu dapat berdampak pada bagaimana individu menafsirkan peristiwa tersebut (Eriyanto, 2002, h. 177).

Tamburaka (2013, h. 22-23) dalam bukunya yang berjudul *Agenda Setting Media Massa* menjelaskan bahwa media adalah penentu kebenaran karena memiliki kemampuan untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda public dengan mengarahkan kesadaran publik, serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Bagaimana sebuah peristiwa dipahami dipengaruhi oleh semua elemen proses produksi berita, sebagai bagian dari komunitas tertentu yang diterpa oleh media akan menyerap nilai-nilai kelompok dalam pandangan pribadinya (Eriyanto, 2002, h. 116).

Media massa memiliki peran untuk menghubungkan seluruh unsur masyarakat satu dengan lainnya dengan melalui produk media massa yang dihasilkan (Tamburaka, 2013, h. 13). Dengan demikian, informasi dari media merupakan informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal dan milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-masing. Amber Boydston menjelaskan ada delapan faktor yang mendorong sebuah media massa dalam membuat informasi tersebut (Tamburaka, 2013, h. 28).

- *Institutional setup*, aturan dan norma yang ada di dalam sistem media massa
- *Events*, peristiwa yang terjadi di dunia nyata
- *Policymaker attention*, seberapa besar perhatian yang diberikan politisi atau pembuat kebijakan lainnya terhadap sebuah isu
- *Public concern*, seberapa besar keprihatinan publik terhadap sebuah isu
- *Diversity of discussion*, seberapa besar konsentrasi media massa lainnya terhadap sebuah isu
- *Agenda congestion*, seberapa besar dampak sebuah isu terhadap agenda media secara keseluruhan dan bagaimana isu tersebut berhubungan dengan isu lainnya
- *Context* – politik, ekonomi, dan sosial-politik, sebagai contoh kapan pemilihan umum presiden diadakan, apakah negara sedang dalam perang, masalah ekonomi

- *Prior attention*, seberapa besar perhatian publik terhadap isu ini sebelumnya

Faktor-faktor tersebut yang akhirnya dapat mempengaruhi pembaca tentang mana pemberitaan yang harus diketahui atau mana isu yang penting untuk dibaca. McCombs dan Shaw menyebut fenomena ini sebagai agenda setting (Nurudin, 2014, h. 195).

Menjelang akhir tahun 2016, Indonesia dihebohkan dengan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kasus ini menjadi perbincangan yang hangat di berbagai media. Peristiwa penistaan agama bermula saat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat berpidato di hadapan warga, dirinya menyatakan tidak akan memaksa warga untuk memilihnya pada pilkada 2017. Dalam pidatonya tersebut ia menyebutkan kalau Surat Al-Maidah ayat 51 dipakai untuk membohongi. Ucapannya inilah yang menuai kontroversi di masyarakat.

Pada 6 Oktober 2016 video Ahok yang menyebut Surah Al-Maidah ayat 51 lalu viral di media sosial lewat postingan akun media sosial Facebook milik Buni Yani. Video ini lalu memicu kemarahan sebagian umat Islam. Setelah menjadi sorotan, pada 10 Oktober 2016 Ahok meminta maaf atas pernyataannya yang menyebutkan Surah Al-Maidah. Ia menyatakan tidak berniat menyinggung umat Islam.

Pada tanggal 14 Oktober 2016 terjadi Demonstrasi dari sejumlah Ormas Islam di depan Balai Kota DKI Jakarta. Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu. 4 November 2016 terjadi unjuk rasa di beberapa titik, seperti di Monas, Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia, dan Istana Kepresidenan. Pada saat waktu demo yang sudah berakhir pukul 18.00, massa menolak untuk dibubarkan dan memaksa untuk bertemu dengan Presiden. Karena tidak mau pergi, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Tiga kendaraan pengangkut milik petugas kepolisian dirusak dan dibakar oleh massa.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena hampir seluruh media meliput tentang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kompas dalam periode Oktober 2016 sampai Desember 2016 memuat 47 berita. Sedangkan Republika dalam periode Oktober 2016 sampai Desember 2016 memuat 127 berita. Selain itu kasus ini menjadi penting karena memiliki muatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Menurut kode etik jurnalistik Dewan Pers tahun 2006 pada pasal 8, Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Lalu pada kode etik jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pasal 16, juga disebutkan kalau jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan,

diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.

Merujuk pada situs [news.okezone.com](http://news.okezone.com), kasus SARA sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, dan beberapa kasus berujung pada kerusuhan hingga kematian. Salah satu kasus SARA di Indonesia adalah tragedi Sampit yang terjadi pada tahun 2001. Kasus ini melibatkan suku Dayak dengan warga Madura. Konflik ini sampai menimbulkan banyak kematian di kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dua media cetak untuk diteliti, yaitu surat kabar Kompas dan Harian Republika. Peneliti memilih surat kabar Kompas karena salah satunya, dengan faktor kemanusiaan yang ditempatkan secara sentral dalam visi mereka. Pemimpin Umum surat kabar ini, Jakob Oetama (2001, h. 149) mengungkapkan bahwa dalam pemberitaannya, Kompas mendidik masyarakat untuk memahami bahwa mungkin saja ada pandangan lain dari setiap persoalan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Media Kit Kompas (2014, h. 5), tercatat bahwa total pembaca setiap harinya pada hari biasa mencapai 1.475.562 sedangkan pada akhir pekan tembus pada angka 2.084.060 pembaca (2014, h. 5). Dengan jangkauan angka sebesar itu, tentu besar kontribusi dan efek yang diberikan Kompas bagi masyarakat Indonesia. Berangkat dari kenyataan tersebut, peneliti memilih surat kabar ini sebagai objek penelitian

untuk mengetahui agenda pemberitaan menyangkut kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Republika dipilih karena, media ini memiliki ideologi nasionalis agamis (islami). Bisa dibuktikan dengan beberapa rubrik yang terdapat pada Koran Republika. Seperti Khazanah, Syariah, dan Dialog Jumat.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji agenda media Kompas dan Republika terkait pemberitaan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Untuk mengetahui bagaimana penonjolan isu kasus penistaan agama pada Kompas dan Republika. Peneliti menggunakan metode penelitian analisis isi. Berita-berita yang akan peneliti ambil adalah berita terkait kasus penistaan agama dalam kurun waktu tiga bulan yaitu dari bulan Oktober 2016 sampai Desember 2016.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana agenda media Kompas dan Republika pada kasus penistaan agama selama periode Oktober-Desember 2016?

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana agenda media Kompas dan Republika pada kasus penistaan agama selama periode Oktober-Desember 2016.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian agenda media dapat memberikan sumbangsih akademis di kemudian hari dan dilengkapi dengan konsep agenda setting. Penelitian ini juga dapat memberi kegunaan dengan pendekatan metodologi analisis isi kuantitatif.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait bagaimana media massa mengkonstruksi isu kasus penistaan agama. Selain itu juga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan penelitian terhadap media, terutama mengenai agenda media dengan pendekatan analisis isi kuantitatif.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A